

LAPORAN PENGABDIAN MANDIRI



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) UMKM
DI DESA BOTU BERANI KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN
BONE-BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

OLEH

M A T T O A S I (NIDN; 0026117303)

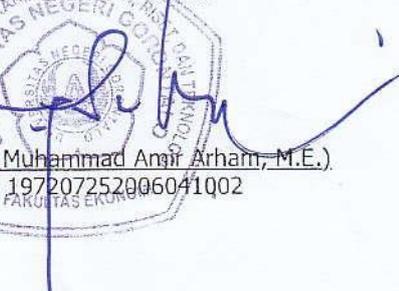
**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MANDIRI TAHUN 2021**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) UMKM DI DESA BOTU BERANI KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE-BOLANGO PROVINSI GORONTALO.
2. Lokasi : Desa Botu Berani Kec.Kabila Bone Kab.Bone Bolango Provinsi Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Mattoasi, S.Pd., S.E., M.Si Ph.D.
 - b. NIP : 197311262005021001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : S1 Akuntansi / Akuntansi
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail :
Alamat :
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : -
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : " orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Desa Botu Berani
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Botu Berani
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 15 km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : Biaya Sendiri
8. Total Biaya : Rp. 3.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.)
NIP. 197207252006041002

Gorontalo, 6 Juli 2021
Ketua



(Mattoasi, S.Pd., S.E., M.Si Ph.D.)
NIP. 197311262005021001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 196105261987031005

BAB SATU

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor usaha yang hingga kini menjadi sektor yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia. Usaha ini dapat bertahan dan berdiri kokoh disaat terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1997. Seperti yang ditegaskan oleh Suci (2017) saat dunia diterpa oleh kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 membuat kondisi ekonomi di Indonesia memburuk dan hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dan berdiri kokoh.

Ketanggaan para pelaku UMKM terhadap krisis ekonomi membuat jumlah UMKM banyak tersebar luas di Indonesia dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia serta dapat menyerap jumlah tenaga kerja. Informasi yang diperoleh melalui Menkop dan UKM (2018) yang menunjukkan jumlah UMKM dan Tenaga Kerja bertambah setiap tahunnya sehingga usaha ini memerlukan pengelolaan yang maksimal. Mengenai karakteristik UMKM di jelaskan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Pesatnya perkembangan jumlah UMKM yang ada di Indonesia membuat para pelaku usaha bersaing dan segala cara untuk tetap mempertahankan usahanya, termasuk UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Dari data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo (2020) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan, namun di dalam pengelolaan keuangan menurut Kepala Desa Botuberani (2020) masih sepenuhnya dilakukan secara sederhana dengan sistem pembukuan tunggal, dan tidak disajikan dalam bentuk laporan keuangan organisasi.

Berdasarkan latar belakang, mengenai pentingnya penerapan pelaporan keuangan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan SAK-ETAP, maka penulis tertarik mengadakan suatu pelatihan dengan formulasi judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Umkm Di Desa Botu Berani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango Provinsi Gorontalo

1.2 Rumusan Kegiatan

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan dalam pengabdian, maka rumusan masalah dalam pengabdian ini bagaimanakah model pengelolaan keuangan UMKM di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango?

1.3. Tujuan Pengabdian

Sejalan dengan analisis situasi dan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam pengabdian ini, maka tujuan pengabdian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan UMKM di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango.

1.4 Manfaat Kegiatan

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat pengabdian yang diharapkan adalah dapat memberi solusi pengelolaan keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone-Bolango.

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 ini. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu: anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.2. Peran Akuntansi Dalam UMKM

Berdasarkan teori entitas, maka penerapan akuntansi penting bagi pelaku usaha dalam melakukan pencatatan keuangan sehingganya pelaku usaha dapat melakukan penggolongan keuangan antara uang pribadi dan uang usaha, disamping itu pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan (Rais, 2019).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, berkaitan dengan pentingnya akuntansi juga sejalan dengan Kieso, Weygandt, & Warfield (2005) serta Niswonger, Warren, Reeve, & Fess, (2000) bahwa penerapan akuntansi itu penting dalam menjalankan suatu usaha hal ini dikarenakan, dengan adanya penerapan akuntansi maka pelaku usaha dapat menghasilkan informasi keuangan secara

keseluruhan yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal, serta dapat mengevaluasi dan mengontrol perkembangan usaha yang dijalankan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Meigs, Meigs, Bettner, & Whittington, (1996) dan Wolk, Tearney, & Dodd, (2001) bahwa penerapan akuntansi dapat membantu pihak manajerial atau pelaku usaha dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan data keuangan organisasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

Dari berbagai pandangan tentang penerapan akuntansi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dapat membantu pelaku usaha dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai informasi yang berkaitan dengan keadaan ekonomi usaha. Hal ini juga berlaku pada UMKM yang berada di Kota Gorontalo, dikarenakan dengan adanya akuntansi maka dapat memberikan dasar informasi dalam pengambilan keputusan strategis mengenai pengembangan usaha.

Sejalan dengan pentingnya menerapkan akuntansi pada UMKM maka menurut UU No 20 Tahun 2008, UMKM didirikan dengan tujuan utama dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Tujuan ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Akbar *et al.*, (2016) bahwa dalam membangun suatu usaha, yang menjadi tujuan awalnya adalah untuk menghasilkan laba yang dapat dinikmati dan dipergunakan dalam perkembangan usaha yang lebih maju.

Berkaitan dengan tujuan didirikannya UMKM, akuntansi berperan penting didalamnya. Menurut Shonhadji *et al.*, (2017) bahwa akuntansi merupakan proses

sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Demikian juga oleh Rais, (2019) penerapan akuntansi sangat diperlukan dalam menjalankan usaha karena berguna untuk mengetahui kondisi keuangan usaha atau perusahaan.

2.3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dalam menjalankan suatu UMKM, maka penerapan akuntansi diperlukan didalamnya. Penerapan akuntansi yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan standar akuntansi dalam hal ini SAK EMKM. Berkaitan dengan SAK EMKM, adalah turunan dari Standar Akuntansi Keuangan dan SAK ETAP tujuannya adalah membantu pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan dengan mudah dan sederhana, sehingga dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam mendapat bantuan dana dan mengetahui perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya SAK EMKM menurut (Suryani & Subardjo, 2020) bahwa diyakini dengan adanya laporan keuangan yang mudah dipahami, mempermudah akses ke sektor perbankan dalam mengajukan sebuah pinjaman modal atau akses pendanaan untuk melakukan pengembangan usaha. Dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, terdapat tiga laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Jauh sebelum adanya SAK EMKM, yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SAK (Standar akuntansi keuangan). SAK adalah ketentuan yang dapat mengatur entitas bisnis dalam melakukan penyusunan laporan

keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Putra, 2018). Tetapi dengan adanya SAK saja tidak cukup dalam membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mengesahkan SAK ETAP yang lebih dikhususkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah turunan dari SAK. SAK ETAP bertujuan untuk dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang sifatnya lebih mudah untuk dipahami oleh pelaku UMKM dalam menerapkan akuntansi sesuai standar, diantaranya ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan ekuitas (Kurniawanysah, 2016).

Dalam menerapkan SAK ETAP ternyata masih terlalu rumit bagi pelaku UMKM dalam menerapkannya. Praktik akuntansi pada UMKM mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana disebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi para pengusaha UMKM sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai, serta menurut pelaku UMKM hal ini terlalu ribet dan dianggap buang-buang waktu (Kurniawanysah, 2016). Oleh karena itu DSAK tidak hanya berhenti sampai pada SAK ETAP saja, tetapi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan SAK EMKM dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016 yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (Uno *et al.*, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM (SAK EMKM, 2016)

Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih sederhana dan mudah dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk aset dan liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis (pencatatan dengan menggunakan harga perolehan). Menurut SAK EMKM (2016) terdapat tiga laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) merancang SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK EMKM baru dapat digunakan mulai efektif 1 Januari 2018.

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menurut Uno *et al.*, (2019) dimaksudkan untuk SAK EMKM digunakan pada entitas mikro, kecil, dan menengah, serta bagi usaha yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2.4. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM

Laporan keuangan menurut Hery (2018) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Hery (2018) maka berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 7, yang dimaksud laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berkaitan dengan definisi tentang laporan keuangan, maka laporan keuangan memiliki tujuan dalam penerapannya, menurut SAK EMKM (2016) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan tujuan laporan keuangan menurut Henawati, Kuntorini, & Pramono, (2019) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti kreditor dan investor. Laporan keuangan tersebut

menunjukkan tanggungjawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sejalan dengan tujuan dari laporan keuangan, maka dalam SAK EMKM juga dijelaskan bahwa laporan keuangan perlu menyajikan laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Demikian juga menurut Suparti, Nuris, Sunaryanto, & Achadiyah, (2019) bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan pencatatan akuntansi dalam menjalankan usahanya, dalam menerapkan catatan akuntansi dibutuhkan pengklasifikasian nomor rekening, neraca awal, jurnal, buku besar, laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang mengacu pada SAK EMKM. Dengan adanya pembukuan dan pencatatan yang baik, maka dapat berfungsi sebagai pengungkit UMKM dalam mengontrol atau memantau, mengevaluasi usaha, dan memudahkan UMKM dalam mengakses kredit dari perbankan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perkembangan usaha yang dimiliki dengan tambahan modal yang ada (Achmad, Dwi & Erna, 2020).

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pemecahan Masalah

Pengelolaan keuangan berdasarkan aturan bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) akan menjadi penting karena setiap organisasi diharapkan dapat dikelola dengan baik termasuk pengelolaan keuangan organisasi. Keberadaan UMKM khususnya di Desa Botuberani diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Secara berurutan kegiatan pengabdian dilaksanakan (1) melakukan sosialisasi terhadap pentingnya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan pada UMKM; (2) melakukan pembimbingan tata cara menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM.

3.2. Hasil Pemecahan Masalah

Setelah studi pendahuluan dilakukan terhadap permasalahan yang ada pada UMKM, maka ditemukan bahwa pengelolaan keuangan/pelaporan keuangan pada setiap UMKM masih dilakukan secara tradisional sehingga sangat berbeda dengan pelaporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. Hal ini penting karena dengan hanya menggunakan laporan keuangan yang bersifat pembukuan tunggal sebagai catatan harian saja seperti yang digunakan selama ini maka organisasi mempunyai kesulitan di dalam memahami secara pasti terhadap kekayaan dan sumber kekayaan organisasi sebagaimana yang berlaku pada umumnya (Dupree dan Marder, 1984).

Begitu pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam suatu organisasi, maka sosialisasi berkenaan dengan tujuan utama penyusunan laporan keuangan organisasi yang dapat dibuat menurut kebutuhan organisasi dengan frekuensi perbulan, triwulan, semesteran atau disusun secara tahunan. Selain aktivitas sosialisasi di dalam pelatihan ini juga peserta dilatih untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM dengan bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. Selain itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan pelaku UMKM dapat memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk jaminan dalam meningkatkan permodalan melalui pendanaan dari perbankan dalam bentuk kredit usaha.

Tujuan akuntansi secara umum terhadap organisasi adalah: (1) untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan termasuk UMKM (2) untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari dari setiap organisasi (3) untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat sehingga tetap dapat menjaga stok persediaan organisasi (4) untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana UMKM, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan UMKM.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibuat, manajemen keuangan melalui pelaporan keuangan dengan menggunakan akuntansi berdasarkan standar, maka dalam sistem akuntansi keuangan UMKM juga menggunakan standar yang sama dalam pembuatan bukti transaksi seperti yang digunakan oleh pengguna akuntansi

pada umumnya. Dalam akuntansi dikenal sifat-sifat bukti yang harus ada di dalamnya. Tanpa adanya sifat-sifat bukti-bukti tersebut, maka pencatatan atau pembukuan menjadi tidak memiliki makna.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini tentang pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah pada pelaku UMKM di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Rata-rata jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Botuberani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango adalah pengolahan Usaha Jahit; Kios harian; rumah makan selain itu dalam bidang usaha Fashion juga semakin diminati oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone Bolango seperti usaha sulam kerawang khas Gorontalo.

4.2 Hasil Pelatihan Pemberdayaan Kepada Masyarakat.

Di dalam pelatihan ini para pelaku UMKM dilatih untuk mengelompokkan aktiva baik yang berupa aktiva lancar maupun dengan kelompok aktiva tetap. Demikian juga para pelaku UMKM juga dilatih untuk menentukan perkiraan sumber aktiva yaitu hutang dan modal. Selain itu para pelaku UMKM juga dibekali cara penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM.

Dari berbagai pelaku UMKM dari berbagai usaha yang mengikuti pelatihan, maka mereka dibekali pemahaman di dalam menyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar, dan lebih khusus kepada penyusunan laporan keuangan yang

berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM. Ditekankan dalam pelatihan ini bahwa setiap UMKM diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar agar dapat melaporkan aktivitas usahanya secara tepat dan berdasarkan prosedur yang ada.

Selain ditekankan kepada pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang di dalamnya telah dilaporkan kekayaan organisasi untuk kepentingan internal organisasi juga diharapkan dapat digunakan untuk pihak-pihak luar organisasi seperti pemerintah; dan para pelaku ekonomi yang lain dan masyarakat. Dan hal yang terpenting juga laporan keuangan ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha melalui peminjaman modal kepada pihak ketiga.

Mengikuti dengan standar akuntansi keuangan UMKM, maka penyusunan laporan keuangan diarahkan untuk penyusunan (1) Laporan Posisi Keuangan Dalam Laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun antara lain Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha, Utang bank, dan Ekuitas;

Selain laporan posisi keuangan juga dilaporkan (2) Laporan Laba Rugi Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun yaitu Pendapatan, Beban Keuangan, Beban Pajak. Entitas menyajikan akun

dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Demikian juga untuk melengkapi penyusunan laporan keuangan dari 2 tahap sebelumnya, maka pelaku UMKM juga diarahkan untuk membuat 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan memuat Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi, dan Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang berisi penjelasan mengenai transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data awal dan informasi awal yang diperoleh serta hasil dari sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK EMKM sangat penting dilakukan karena pengembangan usaha melalui beberapa cara termasuk penambahan modal kerja mensyaratkan adanya laporan keuangan berdasarkan standar EMKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka disarankan kepada para pelaku UMKM agar selalu menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sehingga laporan yang dibuat dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukannya baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Beberapa kelemahan yang dijumpai di dalam UMKM berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, maka perlu selalu ditingkatkan sehingga semua perkiraan atau transaksi baik berkaitan dengan aktiva dan perkiraan sumber aktiva.

Daftar Pustaka

- Achmad, W., Dwi, S., & Erna, S. (2020). The Preparation Of Financial Reports Based On The Micro Entities Of Small and Medium Financial Accounting (SAK EMKM) In Muncul Kicau Micro Bussiness. *Economics & Business*, 2(February), 48–55.
- Akbar, D. S., Darna, N., & Prawiranegara, B. (2016). Analisis Akuntansi Yang Diterapkan UMKM. *Jurnal Analisis Akuntansi Yang Diterapkan UMKM*, 4, 243–254.
- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12–20.
- Dewi, A. C., Suparti, & Restuningdiah, N. (2018). The analysis of accounting system formulation based on sak emkm. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 229–234.
- Ernawati, S., Asyikin, J., & Sari, O. (2016). Pencatatan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan, SAK ETAP, UMKM. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 81–91.
- Farhan, A., & Mulyono, R. D. A. P. (2019). Impementation of SAK EMKM In Cv. Adro Textile Through An Action Research Approach As A From Financial Management Accountability. *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 3(2), 66–73. <https://doi.org/10.26805/jmkli.v3i2.43>.
- Henawati, N., Kuntorini, R. S., & Pramono, I. P. (2019). The Implementation of SAK EMKM on UMKM Financial Reports. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 409(SoRes 2019), 178–182.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2005). *Intermediate Accounting* (A. Morris (ed.)).
- Kurniawanysah, D. (2016). Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, 832–841.
- Meigs, R. F., Meigs, M. A., Bettner, M., & Whittington, R. (1996). *Accounting : The Basis For Business Decisions*.
- Niswonger, C. R., Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2000). *Prinsip-Prinsip Akuntansi* (T. Sihombing (ed.)). Erlangga.

- Prameswari, N. S., Suharto, M., & Afatara, N. (2017). Developing E-Commerce for Micro Small Medium Enterprise (MSME) to Cope with Cultural Transformation of Online Shopping. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 8(2), 188–198. <https://doi.org/10.15294/jdm.v8i2.12759>.
- Pratiwi, C. H. (2018). Penerapan Akuntansi Persediaan Berbasis SAK EMKM Pada UD Andika Jaya Jember. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2, 118–124.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada UMKM DI Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11 (2), 201–217. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita>.
- Putri, R. A., & Nugroho, P. I. (2020). SAK-EMKM Implementation of Medium Enterprise Financial Statement in Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 242–250.
- Rahman, L. F., & Ayudhia, S. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Profiet*, 4, 218–232.
- Rais, R. M. (2019). Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2.
- Savitri, R. V., & Saifudin. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 5(2), 117–125.
- Shonhadji, N., A, L. A., & Djuwito. (2017). *Penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berdasarkan sak emkm di surabaya*. 130–136.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). ALFABETA, CV.
- Suparti, Nuris, D. M., Sunaryanto, & Achadiyah, B. N. (2020). Analysis of Accounting System Formulation for SMEs Based on SAK EMKM. *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences Volume, 2020*, 801–813. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7936>.
- Suryani, N. H., & Subardjo, A. (2020). Penerapan Akuntansi Pelaku UMKM dan Kesesuaiannya Dengan SAK EMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi : Perakayasa Pelaporan Keuangan* (Ketiga). BPFE.
- Uno, M. O., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3887–3898.
- Wolk, H. I., Tearney, M. G., & Dodd, J. L. (2001). *Accounting Theory (A Conceptual and*

Institutional Approach.

Hery. (2018). *Teori Akuntansi* (Ketiga). Prenadamedia Group

Republik Indonesia. 2008, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hariono, Sigit. 2020. *Interview Of “Fenomena Lapangan” On his Home*, Jl. Sultan Botutihe, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo.

Daftar Link Kegiatan

Link Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=x2a5xWt9jj8>